

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ditumbuhi dengan pohon bakau (mangrove) yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sisi ekologis maupun aspek sosial ekonomi (Raman, 2015).

Demi kesejahteraan umat manusia dan untuk mewujudkan pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola dan dijaga keberadaannya. Kerangka pengelolaan hutan mangrove terdapat dua konsep utama. Pertama, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Kedua, restorasi hutan mangrove yaitu kegiatan yang dilakukan yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk pengoptimalan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain (Kordi, 2012).

Mangrove memiliki manfaat sangat luas ditinjau dari aspek ekologi, biologi dan ekonomi. Fungsi ekologi antara lain menjaga kestabilan pantai dan sebagai habitat burung, fungsi biologi sebagai pembenihan ikan, udang dan biota laut pemakan plankton serta sebagai areal budidaya ikan tambak, areal rekreasi dan sumber kayu sebagai fungsi ekonomi. mangrove sebagaimana vegetasi hutan lainnya memiliki peran sebagai penyerap (rosot) karbondioksida (CO₂) dari udara (Bismark, dkk., 2008).

Persoalan deforestasi dan degradasi sumberdaya mangrove yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia muncul karena minimnya pemahaman akan arti penting keberadaannya sebagai penunjang kehidupan. Desakan dari berbagai bidang pembangunan (sandang, pangan, papan) mendorong eksploitasi sumberdaya mangrove secara luas, masif dan terus menerus, sehingga dari total areal 7,8 juta ha hutan mangrove Indonesia, hanya sekitar 30,7% dalam kondisi baik, 27,4% rusak dan 41,9% rusak parah (Departemen Kehutanan, 2008). Kawasan mangrove di Sulawesi berkisar antara 53.000- 133.000 ha, atau sekitar 2 % dari luas total dari daerah yang bermangrove di Indonesia, namun demikian hal tersebut penting bagi masyarakat setempat, dan kecilnya ekosistem tersebut di Sulawesi itu sendiri merupakan alasan yang baik untuk melindungi dan mengupayakan pemeliharannya (Mughtar, 2023).

Salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam hal ekosistem mangrove, adalah Kota Makassar. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar dikenal memiliki potensi laut dan pesisir yang luar biasa terutama di wilayah utara yang dipenuhi oleh hutan mangrove. Kampung nelayan untia telah menjadi

wilayah pendampingan oleh Forum Komunitas Hijau (FKH) sejak tahun 2013 yang diketuai oleh Achmad Yusran Azis.

Forum komunitas hijau adalah wadah bagi berbagai komunitas yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial budaya. Tujuan dari forum ini ialah memperkuat kolaborasi antar komunitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mendorong aksi nyata untuk restorasi lingkungan melalui edukasi dan penyadaran masyarakat. FKH memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan mangrove dan pendampingan masyarakat karena secara aktif terlibat langsung di lapangan.

Upaya restorasi mangrove yang dilakukan oleh FKH di Makassar dalam konteks sebagai edukator masyarakat, pendampingan kebijakan, dan restorasi mangrove secara ekologis. Mangrove di wilayah Makassar, termasuk di kawasan pesisir Untia, bukan hanya sekadar vegetasi yang menghiasi pesisir, melainkan merupakan benteng alami yang melindungi kawasan pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. FKH sebagai *Non-Government Organization* (NGO) dalam restorasi mangrove di Makassar menjadi salah satu indikator penting dalam menunjang keberhasilan restorasi mangrove. Sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana program ini berhasil atau memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungannya, agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang, pendekatan yang digunakan, serta dampaknya terhadap kesadaran, keterlibatan, dan perilaku masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove.

1.2 Teori

Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon tertentu atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Syah, 2020). Mangrove sebagian besar merupakan populasi tumbuhan pesisir tropis yang diwarnai dengan beragam bentuk tumbuhan yang dapat tumbuh dan berkembang di dataran lumpur sepanjang pesisir. Keanekaragaman hayati yang tinggi serta flora dan fauna yang spesifik membedakan hutan ini dengan hutan lainnya. Sebagian besar, mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang dicirikan oleh berbagai jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada dataran lumpur yang terbentang di sepanjang pantai. Keanekaragaman dari tinggi serta flora dan fauna yang spesifik membedakannya hutan dari hutan lain (Naibaho, 2023).

Berikut manfaat-manfaat mangrove yaitu adalah sebagai berikut (Riwayati, 2014):

Menumbuhkan pulau dan menstabilkan pantai

Salah satu peran dan sekaligus manfaat ekosistem mangrove, adalah adanya sistem perakaran mangrove yang kompleks dan rapat, lebat dapat memerangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa air laut dari bagian daratan. Proses ini menyebabkan air laut terjaga kebersihannya dan dengan demikian memelihara kehidupan padang lamun (*seagrass*) dan terumbu karang. Karena proses ini maka mangrove seringkali dikatakan pembentuk daratan karena endapan dan tanah yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan mangrove memperluas batas pantai dan memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan.

Menjernihkan air

Akar pernafasan (akar pasak) dari api-api dan tancang bukan hanya berfungsi untuk pernafasan tanaman saja, tetapi berperan juga dalam menangkap endapan dan bisa membersihkan kandungan zat-zat kimia dari air yang datang dari daratan dan mengalir ke laut. Air sungai yang mengalir dari daratan seringkali membawa zat-zat kimia atau polutan. Bila air sungai melewati akar-akar pasak pohon api-api, zat-zat kimia tersebut dapat dilepaskan dan air yang terus mengalir ke laut menjadi bersih. Banyak penduduk melihat daerah ini sebagai lahan marginal yang tidak berguna sehingga menimbunnya dengan tanah agar lebih produktif. Hal ini sangat merugikan karena dapat menutup akar pernafasan dan menyebabkan pohon mati.

Mengawali Rantai Makanan

Daun mangrove yang jatuh dan masuk ke dalam air. Setelah mencapai dasar teruraikan oleh mikro organisme (bakteri dan jamur). Hasil penguraian ini merupakan makanan bagi larva dan hewan kecil air yang pada gilirannya menjadi mangsa hewan yang lebih besar serta hewan darat yang bermukim atau berkunjung di habitat mangrove.

Melindungi dan memberi nutrisi

Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan dan menjadi daerah nursery bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Ikan dan udang yang ditangkap di laut dan di daerah terumbu karang sebelum dewasa memerlukan perlindungan dari predator dan suplai nutrisi yang cukup di daerah mangrove ini. Berbagai jenis hewan darat berlindung atau singgah bertengger dan mencari makan di habitat mangrove.

Bahan Mangrove dan Bangunan

Batang pohon mangrove banyak dijadikan bahan bakar baik sebagai kayu bakar atau dibuat dalam bentuk arang untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil. Batang pohonnya berguna sebagai bahan bangunan. Bila pohon mangrove mencapai umur dan ukuran batang yang cukup tinggi, dapat dijadikan tiang utama atau lunas kapal layar dan dapat digunakan untuk balok konstruksi rumah tinggal. Batang kayunya yang kuat dan tahan air dipakai untuk bahan bangunan dan cerocok penguat tanah. Batang jenis tancang yang besar dan keras dapat dijadikan pilar, pile, tiang telepon atau bantalan jalan kereta api. Bagi nelayan kayu mangrove bisa juga untuk joran pancing. Kulit pohonnya dapat dibuat tali atau bahan jaring.

Menurut Ilmiliyana (2012) selama dekade terakhir ini emisi CO₂ meningkat dari 1400 juta ton per tahun menjadi 2900 juta ton pertahun. Dengan meningkatnya CO₂ yang ada di atmosfer ini maka akan memicu terjadinya perubahan iklim secara global.

1.2.1 Permasalahan di Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir memiliki fungsi yang beragam sebagaimana peruntukannya. Pada kawasan laut pesisir, dapat menghasilkan sumber bahan pangan bagi manusia, juga dapat menyimpan potensi sumber daya mineral dan energi, seperti minyak dan gas bumi. Selain itu, wilayah laut pesisir memiliki potensi pariwisata yaitu pemandangan alam yang menarik wisatawan dan berbagai pihak lainnya. Terakhir, kawasan pesisir tersebut juga memiliki arti penting sebagai alur pelayaran. Pada saat yang sama, di daratan pesisir, terutama di sekitar muara, pada umumnya akan berkembang pusat-pusat pemukiman. Pada kawasan pesisir ini biasanya tanahnya subur, sehingga berkembang pula kawasan pertanian, perkebunan, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya termasuk prasarana transportasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daratan pesisir sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan upaya-upaya agar kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut dapat berlangsung secara serasi dan seimbang (Indrasari, 2020).

Adapun permasalahan yang mungkin terjadi di kawasan pesisir dikategorikan menjadi (Indrasari, 2020):

(1) Masalah kerusakan fisik lingkungan, yaitu meliputi:

- a) Kerusakan ekosistem, yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dan pantai;
- b) Kerusakan sumber daya ikan;
- c) Pencemaran;
- d) Abrasi, sedimentasi, dan siltasi;
- d) Bencana alam yang terjadi di wilayah pesisir (misalnya tsunami dan banjir).

Kerusakan fisik lingkungan pesisir ini akan berdampak langsung pada penurunan kualitas habitat perikanan dan penurunan fungsi estetika/pariwisata kawasan pesisir.

(2) Masalah sosial ekonomi, yaitu meliputi:

- a) Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk.
- b) Keterbatasan dana dalam Pembangunan.
- c) Kurangnya pemahaman terhadap nilai sumber daya wilayah pesisir.

Jika masalah sosial ekonomi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan berakibat pada terjadinya over exploitation dan pengelolaan yang kurang ramah lingkungan.

(3) Masalah kelembagaan, meliputi:

- a) Masalah konflik kewenangan, yang dapat terjadi karena pembangunan yang bersifat sektoral, sehingga penggunaan sumber daya tidak bisa dilakukan secara terpadu dan efisien, dan adanya konflik penggunaan ruang pesisir juga dapat terjadi karena tidak adanya keterpaduan antar beberapa macam kegiatan pemanfaatan.
- b) Masalah ketidakpastian hukum, yang terjadi karena adanya ambiguitas kepemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir.

1.2.2 Non-Government Organization (NGO)

Banyak aktor yang menunjukkan kepedulian besar terhadap isu lingkungan hidup, termasuk pemerintah, NGO, dan masyarakat. Menurut Konstitusi Indonesia, pengelolaan

lingkungan hidup merupakan kewenangan Pemerintah. Berdasarkan peraturan otonomi daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diserahkan kepada pemerintah daerah dengan peningkatan partisipasi dan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Mina, 2016).

Pada era 50-an, *Non-Government Organization* (NGO) muncul dan memberi warna terhadap strategi pembangunan Indonesia. NGO tampil sebagai penganjur pembangunan alternatif yang didasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi, terutama pada masyarakat miskin. Pada era 60-an lahir beberapa lembaga yang bergerak terutama dalam pengembangan pedesaan. Pendekatan dengan proyek-proyek mikro menjadi ciri utama masa ini, terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan. Dan terakhir pada era 70-an yang merupakan suatu fenomena sangat unik karena dipengaruhi oleh masa orde baru, dasar penggerakannya adalah motivasi untuk mempromosikan peran dan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat (Kholili, 2013).

NGO atau yang umum dikenal dengan organisasi non pemerintah nirlaba, merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan pada pemerintah atau negara, terutama mencari dukungan finansial atau sarana prasarana sebagai fasilitas bagi NGO tersebut. NGO dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kehadiran NGO dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Hal itu akibat kapasitas dan pelayanan pemerintah terhadap warganya masih sangat terbatas. Tidak semua kebutuhan warga dapat (Nurrohman, 2014).

1.2.3 Peranan NGO dalam Restorasi Mangrove

Menurut Setyawan dan Winarno (2006) restorasi mangrove mendapat perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem ini. restorasi dapat menaikkan sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiversitas, produksi perikanan, dan lain-lain.

Menurut Waryono dalam Kinata (2012), konsepsi dasar restorasi (Restorasi) kawasan mangrove dalam bidang konservasi dapat dilakukan melalui:

- (1) penanganan dan pengendalian lingkungan fisik dari berbagai bentuk faktor penyebabnya,
- (2) pemulihan secara ekologis baik terhadap habitat maupun kehidupannya,
- (3) mengharmoniskan perilaku lingkungan sosial untuk tujuan mengenal, mengetahui, mengerti, memahami hingga pada akhirnya merasa peduli dan ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan, melestarikannya.
- (4) meningkatkan akuntabilitas kinerja institusi yang bertanggung jawab dan pihak-pihak terkait lainnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pendampingan oleh NGO dalam restorasi hutan mangrove di Untia, Kota Makassar.

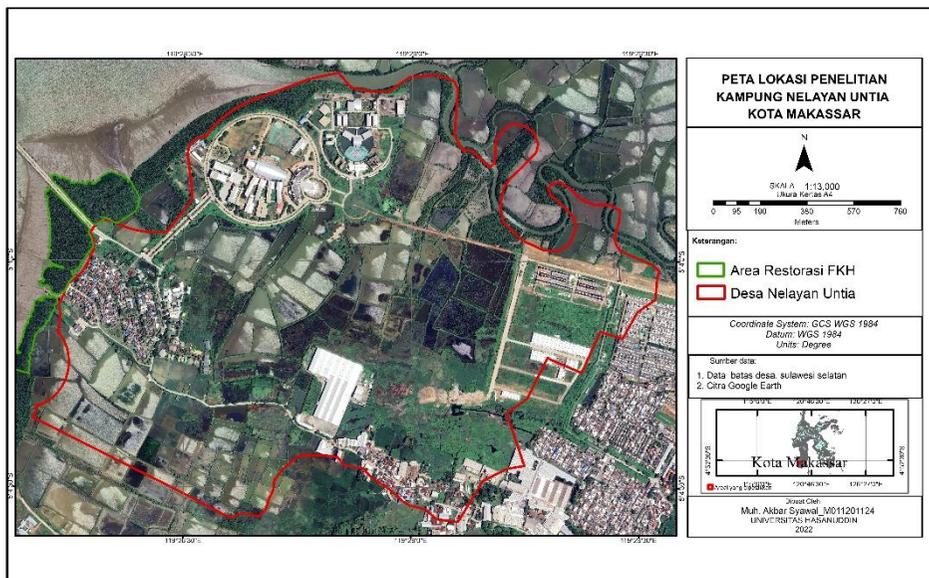
2. Mengetahui keberhasilan NGO dalam pendampingan restorasi hutan mangrove di Untia, Kota Makassar.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan kajian terkait keberhasilan program-program pendampingan yang dijalankan oleh NGO dalam restorasi hutan mangrove di Untia, Kota Makassar.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024, selama kurang lebih 1 bulan. Dimana penelitian ini bertempat di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



Gambar 1. Peta Lokasi penelitian

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Alat tulis menulis, yang digunakan untuk menulis data di lapangan
2. Kamera/hp, yang digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat di lapangan
3. Laptop, untuk menganalisis data yang didapatkan di lapangan.
4. Kuisisioner, berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Menurut Sugiyono (2018), *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kriteria penggalan data tertuju kepada pihak/orang yang mengetahui situasi dan kondisi pendampingan hutan mangrove di Untia dan terlibat secara aktif dalam kegiatan penanaman mangrove yaitu

ketua FKH dan anggota kelompok tani mangrove yang berjumlah 10 orang yang diharapkan dapat mendeskripsikan program yang dijalankan selama pendampingan dan dampak yang didapatkan selama pendampingan.

2.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

2.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dilakukan dengan panduan kuisisioner untuk memperoleh data terkait peran dan dampak pendampingan masyarakat oleh Forum komunitas hijau dalam restorasi mangrove di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur - literatur, studi dokumentasi, sumber sumber tertulis, serta profil Forum komunitas hijau

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilokasi yang akan dilakukan pada penelitian ini akan menggunakan beberapa metode, seperti (Sugiyono,2018):

1. Observasi
Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang ada khususnya perilaku manusia.
2. Wawancara
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan interaksi tanya jawab kepada informan guna memperoleh data yang mendukung kemudian dianalisis.
3. Dokumentasi
Dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hal ini dapat menggambarkan lebih jelas dan mendetail tentang topik/objek yang dibahas

2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Menurut Alfina (2024), analisis kualitatif deskriptif yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik analisis ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi unit analisis. Selanjutnya, sesuai konteks yang teramati, data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis.